

**PERAN PEMERIKSA BPK RI DALAM PEMERIKSAAN
INFRASTRUKTUR DAN KAITANNYA DENGAN PROFESI INSINYUR**

LAPORAN PENELITIAN

NUR AZANI, S.T., M.T.

2441612145

PEMBIMBING:
Dr. Ir. EVITAYANI, S.Pt., M.Agr., IPM., ASEAN Eng.



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

**PERAN PEMERIKSA BPK RI DALAM PEMERIKSAAN
INFRASTRUKTUR DAN KAITANNYA DENGAN PROFESI INSINYUR**

NUR AZANI, S.T., M.T.

2441612145



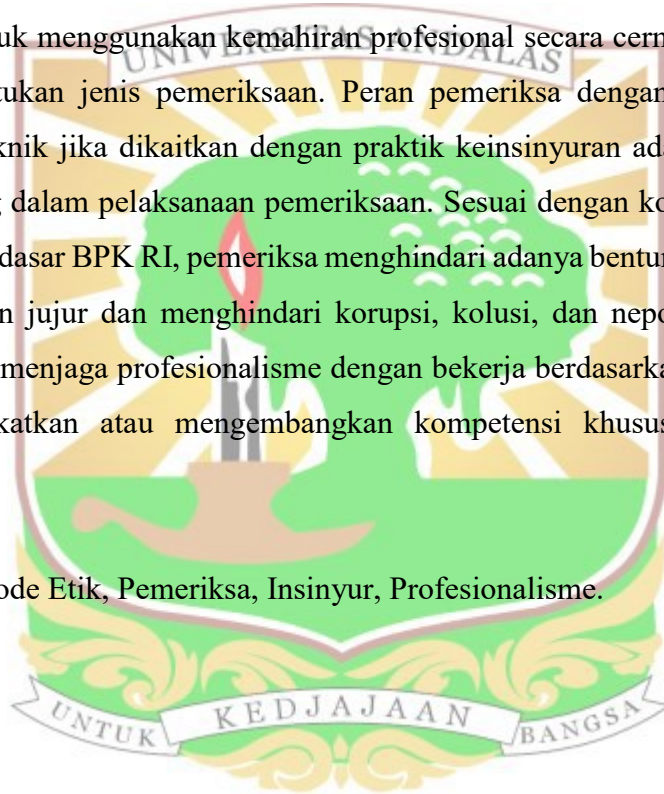
**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Insinyur pada
Sekolah Pascasarjana
Universitas Andalas**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2025**

INTISARI

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK RI bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Salah satu jenis pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu, contohnya pemeriksaan infrastruktur. BPK RI telah menerbitkan SPKN yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan. SPKN mensyaratkan pemeriksa untuk menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan. Peran pemeriksa dengan latar belakang pendidikan teknik jika dikaitkan dengan praktik keinsinyuran adalah peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemeriksaan. Sesuai dengan kode etik insinyur dan nilai-nilai dasar BPK RI, pemeriksa menghindari adanya benturan kepentingan, bekerja dengan jujur dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme, bersikap objektif, serta menjaga profesionalisme dengan bekerja berdasarkan keilmuan dan tetap meningkatkan atau mengembangkan kompetensi khususnya di bidang keinsinyuran.

Kata kunci: Kode Etik, Pemeriksa, Insinyur, Profesionalisme.



ABSTRACT

State financial audit include audit of state financial management and audit of state financial responsibility. Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) is tasked with auditing the management and accountability of state finances carried out by the Central Government, Regional Governments, other State Institutions, Bank Indonesia, State-Owned Enterprises, Public Service Agencies, Regional-Owned Enterprises, and other institutions or bodies that manage government finances. One type of the audit is an audit with a specific purpose, for example an infrastructure audit. BPK RI has established the SPKN which is a guideline for implementing audits. The SPKN requires auditors to use professional skills carefully and thoroughly in determining the type of audit. The role of auditors with an engineering education background when associated with engineering practices is a very important role in implementing audits. In accordance with the code of ethics for engineers and the basic values of the BPK RI, auditors avoid conflicts of interest, work honestly and avoid corruption, collusion, and nepotism, act objectively, and maintain professionalism by working based on knowledge and continuing to improve or develop competencies, especially in the field of engineering.

Keywords: Code of Ethics, Auditor, Engineer, Professionalism.

